

PROFIL DEBITUR KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

LATIF ADAM, MEBY DAMAYANTI DAN RM. PURNAGUNAWAN

KERTAS KERJA TNP2K 30 – 2015
Juli 2015

TNP2K WORKING PAPER

PROFIL DEBITUR KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

LATIF ADAM, MEBY DAMAYANTI DAN RM. PURNAGUNAWAN

KERTAS KERJA TNP2K 30 – 2015
Juli 2015

Seri Kertas Kerja TNP2K menyebarluaskan temuan-temuan dari pekerjaan yang sedang berjalan guna mendorong diskusi dan pertukaran ide-ide dalam bidang kemiskinan, perlindungan sosial dan isu-isu pembangunan.

Temuan, penafsiran dan kesimpulan dalam laporan ini merupakan pandangan penulis dan bukan mencerminkan pandangan dari Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia.

Dukungan terhadap publikasi ini diberikan oleh Pemerintah Australia melalui *Poverty Reduction Support Facility* (PRSF).

Anda dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan nonkomersial.

Saran kutipan: Adam, Latif, Meby Damayanti dan RM. Purnagunawan. 'Profil Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR)'. Kerta Kerja TNP2K 30-2015. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Jakarta, Indonesia.

Untuk meminta salinan kertas kerja ini atau untuk keterangan lebih lanjut mengenai laporan lainnya, dipersilakan menghubungi *TNP2K-Knowledge Management Unit* (kmu@tnp2k.go.id). Laporan ini juga tersedia pada situs web TNP2K.

TNP2K

Grand Kebon Sirih Lt.4,
Jl.Kebon Sirih Raya No.35,
Jakarta Pusat, 10110
Tel: +62 (0) 21 3912812
Fax: +62 (0) 21 3912513
www.tnp2k.go.id

PROFIL DEBITUR KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Latif Adam, Meby Damayanti dan RM. Purnagunawan¹

Juli 2015

ABSTRAK

Kertas kerja ini menganalisis profil debitur KUR, terutama yang berkaitan dengan lokasi debitur, lokasi usaha, bidang usaha, sektor ekonomi, plafon kredit dan baki debit, tanggal mulai dan jatuh tempo pinjaman, tingkat suku bunga serta status kelancaran pengembalian pinjaman. Data yang digunakan untuk analisis merupakan data mikro yang berasal dari Sistem Informasi Debitur (SID) yang dimiliki Bank Indonesia. Hasil analisis menunjukkan SID belum sepenuhnya bisa diandalkan untuk memotret secara sempurna profil debitur KUR. Dibandingkan dengan data KUR dari Komite Kebijakan KUR, hasil analisis menunjukkan, untuk beberapa kasus SID cenderung *under reported* dan untuk beberapa kasus lainnya cenderung *over reported*. Selain itu, dengan menjadikan aturan KUR sebagai kerangka acuan, beberapa poin dari SID juga cenderung berbeda dari aturan yang ditetapkan. Agar SID bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai basis data untuk menganalisis secara lebih valid mengenai profil debitur KUR dan dampak dari kebijakan KUR terhadap pemberdayaan UKM, penciptaan kesempatan kerja, dan pengurangan kemiskinan, maka tata kelola SID perlu mendapat perbaikan. Kertas kerja ini merekomendasikan perbaikan tata kelola SID, khususnya di tiga bidang: proses pengumpulan data, manajemen pengelolaan data, dan integrasi SID dengan data KUR yang dimiliki Jamkrindo, Askrindo, dan Komite Kebijakan KUR.

¹ Latif Adam, *SME Specialist*, TNP2K (latif_adam@yahoo.com.au), Meby Damayanti, *Research Specialist*, TNP2K (meby_damayanti@yahoo.com), RM. Purnagunawan, *Senior Researcher Employment and Income Generation Policies*, TNP2K (mpurnagunawan@gmail.com).

Terima kasih kepada Bimo Suhariyanto yang telah menyunting naskah ini dan Purwa Rahmanto yang menyusun tata letak kertas kerja.

Daftar Isi

Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vi
Latar Belakang	1
Desain Program KUR.....	2
Gambaran Umum Data KUR.....	7
Profil Debitur KUR Berdasarkan Data SID	11
Lokasi Debitur KUR	11
Sektor Ekonomi.....	11
Plafon dan Baki Debet.....	13
Periode Pinjaman.....	16
Suku Bunga	17
Kelancaran Pengembalian Pinjaman.....	20
Rekomendasi	23
Daftar Pustaka	25

Daftar Gambar

Gambar 1. Mekanisme Penyaluran KUR.....	4
---	---

Daftar Tabel

Tabel 1. Landasan Hukum Program Kebijakan KUR	3
Tabel 2. Ruang Lingkup dan Hubungan Kerja Institusi dalam Pelaksanaan KUR	5
Tabel 3. Perubahan dalam Pelaksanaan Program KUR	6
Tabel 4. Penggolongan Jenis Kredit dalam Sistem Informasi Debitur	7
Tabel 5. Jumlah Nasabah dengan Golongan Kredit 10, 20 dan 30	8
Tabel 6. Jumlah Nasabah Berdasarkan Nilai Plafon dan Baki Debet	9
Tabel 7. Jumlah Debitur KUR Berdasarkan Golongan Kredit SID dan Jenis Pinjaman	10
Tabel 8. Jumlah Debitur Berdasarkan Provinsi dan Kelompok Pinjaman KUR	12
Tabel 9. Jumlah Debitur Berdasarkan Sektor Usaha dan Kelompok Pinjaman KUR (%).....	13
Tabel 10. Jumlah dan Rata-rata Plafon Kredit Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kredit.....	14
Tabel 11. Jumlah dan Rata-rata Baki Debit Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kredit.....	15
Tabel 12. Perkembangan Jumlah Nasabah Menurut Tahun Mulai Pinjaman dan Jenis Pinjaman	16
Tabel 13. Rata-rata Tingkat Suku Bunga Berdasarkan Jenis dan Tahun Mulai Pinjaman.....	18
Tabel 14. Rata-rata Tingkat Suku Bunga Berdasarkan Jenis Pinjaman dan Provinsi.....	19
Tabel 15. Jumlah Nasabah Berdasarkan Status Kolektibilitas dan Provinsi.....	20
Tabel 16. Jumlah Nasabah Berdasarkan Status Kolektibilitas dan Jenis Pinjaman.....	21
Tabel 17. Jumlah Nasabah Berdasarkan Status Kolektibilitas dan Sektor Usaha	22
Tabel 18. Rekomendasi Perbaikan SID	24

Latar Belakang

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dimulai sejak tahun 2007 merupakan program untuk memperlebar akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) terhadap kredit perbankan melalui skema penjaminan kredit parsial (*partial credit guarantee scheme*) yang diberikan secara otomatis (*automatic guarantee*). Dalam desain program KUR, peningkatan akses UMKM terhadap kredit perbankan diharapkan mampu meningkatkan kinerja UMKM sehingga akhirnya bisa lebih berperan dalam memperluas kesempatan kerja, menciptakan sumber pendapatan, dan mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Beberapa kajian (e.g. P2E LIPI 2013; TNP2K 2014; BKF 2014) menunjukkan bahwa di satu sisi KUR mampu meningkatkan kinerja UMKM penerima. UMKM penerima program KUR memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan UMKM nonpenerima program dilihat dari tingkat keuntungan, pendapatan dan pemilikan asset (P2E LIPI 2013). Demikian halnya, setelah mendapatkan akses ke program KUR, UMKM penerima KUR memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum mendapatkan akses dilihat dari kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan kepemilikan aset bisnis (TNP2K 2014).

Di sisi lain, beberapa studi juga meragukan kemampuan KUR untuk berkontribusi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Misalnya, P2E LIPI (2012) menyimpulkan hanya 15 persen dari 150 responden penerima KUR yang disurvei memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. Penelitian Kartika (2012) menunjukkan kesimpulan yang kurang lebih sama, di mana penerima KUR terkonsentrasi di desil 3 dan desil 7. Kebanyakan RTM berada di desil 1 dan desil 2, namun sayangnya proporsi KUR yang tersalur ke desil tersebut kurang dari 12 persen dari total penerima KUR.

Terdapat dugaan bahwa kekurangmampuan KUR berkontribusi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan merupakan akibat dari kelemahan program ini mengidentifikasi target penerima secara tepat (*feasible but unbankable*). Dugaan ini semakin kuat dikaitkan dengan volume pinjaman serta jumlah debeturnya yang meningkat dengan sangat signifikan dari tahun ke tahun. Studi BKF (2014) memang menunjukkan volume pinjaman dan debitur KUR justru sebagian besar merupakan UMKM dengan kategori *feasible* dan *bankable* (76 persen), sedangkan penerima dengan kategori *feasible* dan *unbankable* hanya 24 persen.

Manajemen data yang baik sehingga bisa menggambarkan profil debitur KUR secara komprehensif memiliki peran penting untuk mengurangi permasalahan salah sasaran (*miss target*). Sayangnya, sejak peluncurannya, data mengenai debitur KUR yang dimiliki oleh pemerintah merupakan data yang dilaporkan oleh masing-masing bank pelaksana, yaitu data volume pinjaman, jumlah debitur serta *Non Performing Loan* (NPL). Data itu pun masih disajikan dalam bentuk agregat. Dengan demikian, pemerintah memiliki pengetahuan yang sangat terbatas mengenai profil debitur KUR.

Tujuan kertas kerja ini adalah mengidentifikasi profil debitur KUR, terutama yang berkaitan dengan lokasi debitur, lokasi usaha, bidang usaha, jumlah dan lama pinjaman serta tingkat suku bunga. Teridentifikasinya profil debitur akan membantu pemerintah melakukan analisis mengenai perubahan aturan dan kebijakan KUR. Profil debitur juga sangat penting untuk menganalisis dampak dari KUR terhadap kinerja UMKM, penciptaan kesempatan kerja, penciptaan pendapatan, dan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Desain Program KUR

KUR merupakan program untuk memperlebar akses UMKM terhadap kredit perbankan berbasis tingkat bunga pasar (nonsubsidi bunga)² serta menggunakan skema penjaminan kredit parsial (*partial credit guarantee scheme*) yang diberikan secara otomatis (*automatic guarantee*). Dalam program KUR, peningkatan akses UMKM terhadap kredit perbankan didesain untuk meningkatkan kinerja UMKM sehingga UMKM diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi rumah tangga miskin (RTM). Dalam konteks ini secara implisit terlihat bahwa program KUR didesain untuk mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan secara tidak langsung melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas UMKM dalam menciptakan kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi RTM.

Dana yang disalurkan dalam program KUR sepenuhnya merupakan dana pihak ketiga (DPK) milik perbankan. Pemerintah hanya memberikan insentif dengan menjamin sebagian risiko kredit (70%-80%)³ melalui lembaga penjaminan. Perusahaan penjaminan milik pemerintah (Jamkrindo, Askrindo, Jamkrida Jatim, dan Jamkrida Bali) berperan sebagai lembaga penjaminan KUR. Karena dana KUR merupakan dana milik perbankan, maka mekanisme dan ketentuan penyaluran KUR ditentukan oleh bank pelaksana itu sendiri dengan prinsip-prinsip kredit komersial. Pemerintah hanya menentukan persyaratan umum, misalnya nilai kredit per nasabah untuk KUR Mikro adalah Rp1 juta–Rp20 juta per debitur, dan Rp20 juta–Rp500 juta untuk KUR Ritel. Persyaratan umum dan landasan hukum dalam pelaksanaan Program KUR dapat dirangkum dalam Tabel 1 dan Tabel 3.

Secara teknis, mekanisme penyaluran KUR seperti telah disepakati di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Program KUR bahwa pelaku UMKM yang sudah *feasible* tetapi *unbankable*⁴ mengajukan aplikasi pinjaman ke bank-bank penyalur KUR. Bank penyalur kemudian menganalisis aplikasi, dan apabila disetujui, bank akan melaporkan data pinjaman tersebut ke perusahaan penjamin kredit yang ditunjuk (Gambar 1). Apabila terjadi kemacetan, bank dapat mengajukan klaim ke perusahaan penjamin yang bersangkutan untuk kemudian digantikan sebesar 70–80 persen, sesuai dengan sektor usaha debitur.

² Pelaksanaan program KUR yang berbasis nonsubsidi tidak menghilangkan sama sekali paradigma penyaluran kredit program berbasis subsidi bunga. Selain KUR, masih terdapat beberapa program kredit murah yang dilakukan dengan penetapan tingkat suku bunga jauh di bawah suku bunga pasar, seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dan beberapa skema kredit yang dikelola pemerintah daerah. Sayangnya sinergi antara program KUR dengan program kredit murah lainnya belum terbangun secara solid, tetapi justru cenderung berkompetisi dan tumpang-tindih sehingga ketepatsasaran dari masing-masing program kredit menjadi sulit teridentifikasi (P2E LIPI, 2014)

³ Untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan dan industri kecil 80 persen. Untuk sektor lainnya 70 persen.

⁴ *Feasible* didefinisikan jika usaha calon debitur menguntungkan/memberikan laba sehingga mampu membayar bunga/margin dan mengembalikan seluruh utang/kewajiban pokok kredit/pembiayaan dalam jangka waktu yang telah disepakati antara bank pelaksana dengan debitur KUR dan memberikan sisa keuntungan untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan *unbankable* adalah UMKM yang belum dapat memenuhi persyaratan perkreditan/pembiayaan dari bank pelaksana antara lain dalam hal penyediaan agunan dan pemenuhan persyaratan perkreditan/pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan bank pelaksana (Kemenko Perekonomian 2011)

Pada intinya, SOP merupakan butir-butir penting mengenai tata pelaksanaan KUR (*code of practice*) yang disepakati setelah penandatanganan sebuah Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara pihak pemerintah,⁵ perbankan,⁶ dan perusahaan penjamin kredit⁷ pada 9 Oktober 2007 tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi, sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 6/2007. Selain pemerintah, perbankan, dan perusahaan penjamin kredit, BI/OJK dan BPKP juga menjadi *stakeholder* penting dalam pelaksanaan program KUR dengan peran utama sebagai pengawas. Secara lebih rinci, ruang lingkup dan hubungan kerja dari institusi yang terkait dalam pelaksanaan KUR dijelaskan di Tabel 2.

Tabel 1. Landasan Hukum Program Kebijakan KUR

2007
<ul style="list-style-type: none"> • Inpres No. 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UKM • MoU antara pihak pemerintah, bank penyalur dan perusahaan penjamin
2008
<ul style="list-style-type: none"> • Perpres 2/2008 tentang Lembaga Penjaminan • Addendum I MoU terkait nilai pinjaman KUR maksimal Rp5.000.000 dengan tingkat suku bunga maksimal 24%. • PMK No. 135/PMK.05/2008 terkait besaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar 1,5% dan besar penjaminan sebesar 70%.
2010
<ul style="list-style-type: none"> • Addendum II dan Adendum III MoU terkait KUR Mikro dengan plafon pinjaman maksimal Rp 20.000.000 dengan tingkat suku bunga maksimal 22%, dan KUR Ritel dengan plafon pinjaman maksimal Rp500.000.000 dengan tingkat suku bunga maksimal 14%, serta penjaminan. • KEP-07/M.EKON/01/2010 tentang Penambahan Bank Penyalur KUR (13 BPD^a) • PMK No. 189/PMK.05/2010 terkait penambahan besaran IJP dari 1,5% menjadi 3,25%
2011
<ul style="list-style-type: none"> • PMK No. 99/PMK.010/2011 terkait Perubahan Modal Disetor dari Rp50 M menjadi Rp25 M untuk perusahaan penjamin kredit daerah.
2012
<ul style="list-style-type: none"> • KEP-07/M.EKON/01/2012 terkait penambahan dua perusahaan penjaminan kredit daerah dalam skema KUR, yaitu Jamkrida Jatim dan Jamkrida Bali Mandara • Kep-08/M.EKON/-/1/2012 terkait penambahan bank penyalur KUR (13 BPD^b)

^a Bank DKI, Bank Nagari, Bank Jabar Banten, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jatim Bank NTB, Bank Kalbar, BPD Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank Maluku, Bank Papua.

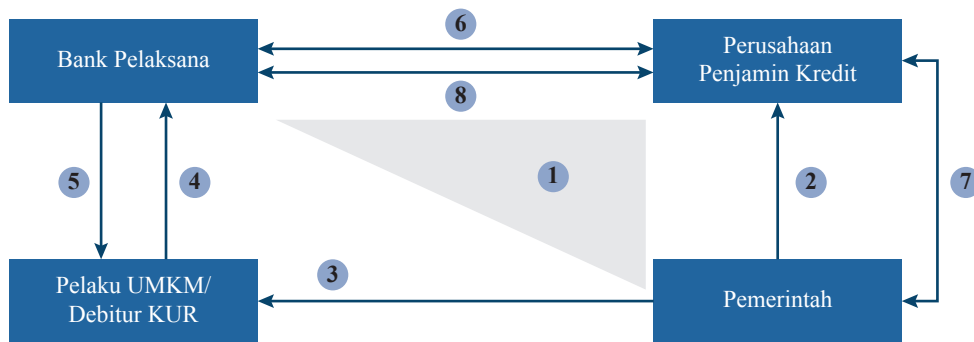
^b BNI Syariah, BPD Kaltim, BPD Bengkulu, BPD Lampung, BPD Riau-Kepri, BPD NTT, BPD Sulsel, BPD Sumsel-Babel, BPD Sulawesi Tengah, BPD Sumut, BPD Aceh, BPD Jambi, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Bali.

⁵ Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian.

⁶ Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri.

⁷ Perum Jamkrindo, PT Askrindo.

Gambar 1. Mekanisme Penyaluran KUR



Keterangan:

1. Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara pihak Pemerintah, Perusahaan Penjamin Kredit dan Bank Pelaksana.
2. Pemerintah melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2 triliun ke PT Askrindo dan Perum Jamkrindo.
3. Pemerintah mempersiapkan UMKM dan Koperasi yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau klaster untuk dapat dibiayai dengan kredit/pembiayaan; menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit/pembiayaan; melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan; dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dan Koperasi dengan pihak lain seperti perusahaan inti yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.
4. Pelaku UMKM mengajukan aplikasi KUR ke bank pelaksana, dan apabila disetujui, pelaku UMKM menjadi debitur KUR di bank penyalur dan berkewajiban untuk membayar cicilan kredit/pembiayaan sesuai dengan ketentuan.
5. Bank pelaksana melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit/pembiayaan sesuai ketentuan.
6. Bank pelaksana mengirimkan daftar debitur KUR ke perusahaan penjamin kredit, yang kemudian akan memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank penyalur, dalam bentuk sertifikat penjaminan.
7. Perusahaan penjamin kredit mengajukan klaim pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) ke pemerintah dan pemerintah membayarkan IJP tersebut
8. Bank penyalur mengajukan klaim untuk kredit/pembiayaan yang mencapai status kolektabilitas 4 dan 5 ke perusahaan penjamin kredit, yang kemudian akan memverifikasi pengajuan tersebut dan membayarkan tagihan klaim sesuai dengan ketentuan.

Sumber: Berbagai Peraturan dan Keputusan Menteri terkait KUR

Sejalan dengan itu, dibentuk pula Komite Kebijakan Program KUR, dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian sebagai koordinator komite, melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor: KEP-05/M.EKON/01/2008 tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi pada 31 Januari 2008. Tugas utama dari Komite Kebijakan KUR adalah untuk mengoordinasikan pelaksanaan program di antara para pemangku kepentingan, guna memastikan tujuan Program KUR dapat diwujudkan bersama-sama, yaitu untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengurangi tingkat kemiskinan secara keseluruhan di Indonesia.

Tabel 2. Ruang Lingkup dan Hubungan Kerja Institusi dalam Pelaksanaan KUR

Institusi	Ruang Lingkup Kerja		
<p>Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Perekonomian • Kementerian Keuangan • Kementerian Koperasi dan UKM • Kementerian Pertanian • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Perindustrian • Kementerian Kehutanan • Kementerian Perdagangan • Kementerian BUMN • Kementerian Nakertrans 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempersiapkan UMKM dan Koperasi yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau klaster untuk dapat dibiayai dengan kredit/pembiayaan. • Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima kredit/pembiayaan. • Melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit/pembiayaan. • Memfasilitasi hubungan antara UMKM dan Koperasi dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/<i>offtaker</i> yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha. 		
<p>Lembaga Penjaminan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perum Jamkrindo • PT Askrindo 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan persetujuan penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan bank pemberi kredit sesuai perjanjian kerja sama yang dibuat antara lembaga penjaminan dan bank pemberi kredit. • Melaporkan secara periodik pelaksanaan penyaluran kredit/pembiayaan, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, kepada Komite Kebijakan cq Deputi Menko Perekonomian bidang Koordinasi Makro dan Keuangan selaku Ketua Tim Pelaksana dengan format laporan berisi; (1) pengajuan penjaminan KUR, (2) pengajuan klaim KUR, (3) realisasi pembayaran klaim, (4) klaim yang masih dalam proses, (5) klaim yang ditolak. 		
<p>Bank Pemberi Kredit</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • BRI • Bank Mandiri • BNI • BTN • Bukopin • Bank Syariah Mandiri • Bank DKI • Bank Nagari • Bank Jabar-Banten • Bank Jateng • Bank DIY • Bank Jatim • Bank NTB • Bank Kalbar • Bank Kalsel • Bank Kalteng </td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> • Bank Sulut • Bank Maluku • Bank Papua • Bank Aceh • Bank Sumut • Bank Riau Kepri • Bank Jambi • Bank Sumsel Babel • Bank Bengkulu • Bank Lampung • Bank Bali • Bank NTT • Bank Kaltim • Bank Sulteng • Bank Sultra • Bank Sulselbar </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> • BRI • Bank Mandiri • BNI • BTN • Bukopin • Bank Syariah Mandiri • Bank DKI • Bank Nagari • Bank Jabar-Banten • Bank Jateng • Bank DIY • Bank Jatim • Bank NTB • Bank Kalbar • Bank Kalsel • Bank Kalteng 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Sulut • Bank Maluku • Bank Papua • Bank Aceh • Bank Sumut • Bank Riau Kepri • Bank Jambi • Bank Sumsel Babel • Bank Bengkulu • Bank Lampung • Bank Bali • Bank NTT • Bank Kaltim • Bank Sulteng • Bank Sultra • Bank Sulselbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit/pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku pada bank pemberi kredit. • Menatausahakan KUR secara terpisah dengan program kredit lainnya. • Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyediakan dan menyalurkan KUR secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah serta mematuhi ketentuan penatausahaan yang berlaku. • Menyalurkan KUR secara langsung kepada UMKM dan Koperasi dan/atau tidak langsung melalui lembaga linkage dengan pola <i>executing</i> dan/atau pola <i>channeling</i>. • Menetapkan tingkat bunga untuk KUR sampai dengan Rp20 juta (KUR Mikro) sebesar 22% per tahun dan untuk KUR di atas Rp5 juta sampai Rp500 juta (KUR Ritel) sebesar 14% per tahun. • Melaporkan secara periodik pelaksanaan penyaluran kredit/pembiayaan, paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, kepada Komite Kebijakan cq Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan selaku Ketua Tim Pelaksana dengan format laporan berisi; (1) realisasi jumlah penyaluran dan baki debet KUR, (2) realisasi penyaluran KUR menurut sektor ekonomi, (3) realisasi penyaluran KUR menurut provinsi, (4) jumlah debitor penerima KUR.
<ul style="list-style-type: none"> • BRI • Bank Mandiri • BNI • BTN • Bukopin • Bank Syariah Mandiri • Bank DKI • Bank Nagari • Bank Jabar-Banten • Bank Jateng • Bank DIY • Bank Jatim • Bank NTB • Bank Kalbar • Bank Kalsel • Bank Kalteng 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Sulut • Bank Maluku • Bank Papua • Bank Aceh • Bank Sumut • Bank Riau Kepri • Bank Jambi • Bank Sumsel Babel • Bank Bengkulu • Bank Lampung • Bank Bali • Bank NTT • Bank Kaltim • Bank Sulteng • Bank Sultra • Bank Sulselbar 		
<p>Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> • BI/OJK • BPKP 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengawasi pelaksanaan program KUR agar sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian perbankan. • Mengawasi penggunaan keuangan negara yang mendukung pelaksanaan program KUR. 		

Sumber: Diolah dari Komite Kebijakan Penjamin Kredit/Pembiayaan Kepada UMKM, 2010, Kumpulan Peraturan Terbaru KUR.

Komite Kebijakan juga bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, program dan rencana kerja, serta langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan koperasi, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan MoU tentang penjaminan kredit/ pembiayaan kepada UMKM dan koperasi, menetapkan langkah-langkah strategis untuk penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan kredit/pembiayaan kepada UMKM dan koperasi, serta melakukan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan Menko Perekonomian. Dalam rangka menjalankan mandatnya, Komite Kebijakan telah mengeluarkan tiga addendum dari MoU awal, yang menyatakan berbagai perubahan dalam pelaksanaan Program KUR, yaitu pada bulan Mei 2008, Januari 2010 dan September 2010 (Tabel 3).

Tabel 3. Perubahan dalam Pelaksanaan Program KUR

Keterangan	2007	2010	2012
IJP yang dibayarkan pemerintah	1,5%	3,25%	Sama dengan 2010
Besar penjaminan	70%	70% - 80%	Sama dengan 2010
Plafon pinjaman <ul style="list-style-type: none"> • KUR Mikro • KUR Ritel • KUR Linkage 	Rp1–Rp5 juta Rp5 juta–Rp500 juta	Rp1–Rp20 juta Rp20 juta–Rp500 juta < Rp1 miliar	Sama dengan 2010
Tingkat suku bunga	24% 16%	22% 14%	Sama dengan 2010
Tenor pinjaman <ul style="list-style-type: none"> • Kredit Modal Kerja • Kredit Investasi 		3 tahun 5 tahun	Sama dengan 2010
Perpanjangan, Suplesi dan restrukturisasi pinjaman <ul style="list-style-type: none"> • Kredit Modal Kerja • Kredit Investasi 		6 tahun 10 tahun	Sama dengan 2010
Jumlah bank penyalur	6 bank nasional	+ 13 BPD yang menyalurkan KUR Mikro dan Ritel	+ 1 bank nasional dan 13 BPD yang menyalurkan KUR Mikro saja
Perusahaan Penjamin Kredit	2 BUMN (PT Askrido dan Perum Sarana Pengembangan Usaha)	2 BUMN (PT Askrido dan Perum Jamkrindo)	+ 2 BUMD (Jamkrida Jawa Timur dan Bali Mandara)
Syarat penerimaan	Kredit/pembiayaan baru dan/atau diberikan kepada debitur baru (debitur belum pernah menerima pinjaman apapun dari bank)	Kredit/pembiayaan dapat disalurkan kepada UMKM dan Koperasi yang tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari bank (kecuali Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya) dan/atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah pada saat kredit/pembiayaan diajukan	Sama dengan 2010

Sumber: Berbagai Peraturan dan Keputusan Menteri terkait KUR

Gambaran Umum Data KUR

Tulisan ini mencoba untuk menganalisis profil debitur KUR dengan menggunakan data mikro yang berasal dari Sistem Informasi Debitur (SID) yang dimiliki oleh Bank Indonesia. SID memuat informasi mengenai status pinjaman oleh debitur di seluruh Indonesia, termasuk lokasi debitur, lokasi usaha, bidang usaha, sektor ekonomi, plafon dan baki debit, tanggal mulai dan jatuh tempo pinjaman, tingkat suku bunga serta status kelancaran pengembalian pinjaman. Untuk keperluan penelitian ini Bank Indonesia memberikan data yang hanya mencakup data pinjaman dengan plafon (batas) pinjaman maksimal Rp500 juta sampai dengan Mei 2013 yang mencakup 28.575.412 nasabah.⁸ Perlu untuk dicatat, data pada bulan Mei 2013 bukan merupakan posisi akhir bulan, tetapi hanya mencakup sampai tanggal di mana data tersebut diminta. Hanya sebagian kecil dari nasabah yang memulai pinjaman pada bulan Mei 2013 yang tercatat,⁹ sehingga kami memfokuskan penelitian dengan periode hingga April 2013.

Data SID tidak memiliki informasi yang spesifik mengenai apakah seorang debitur memperoleh pinjaman dari Program KUR atau pinjaman lainnya (program kredit lain ataupun kredit komersial). Namun, data SID menggunakan sistem pengkodean khusus untuk membagi debitur menjadi 10 golongan kredit (Tabel 4). Berdasarkan informasi dari hasil konsultasi dengan pihak Bank Indonesia, diketahui bahwa sandi 10, 20 dan 30 adalah merupakan pinjaman KUR.

Tabel 4. Penggolongan Jenis Kredit dalam Sistem Informasi Debitur

No	Golongan Kredit	Sandi
1	Debitur UMKM - UMK Jaminan Bersyarat - Penjamin Tertentu - Mikro	10
2.	Debitur UMKM - UMK Jaminan Bersyarat - Penjamin Tertentu - Kecil	20
3.	Debitur UMKM - UMK Jaminan Bersyarat - Penjamin Tertentu - Menengah	30
4.	Debitur UMKM - UMK Jaminan Bersyarat - Penjamin Lainnya - Mikro	40
5.	Debitur UMKM - UMK Jaminan Bersyarat - Penjamin Lainnya - Kecil	50
6.	Debitur UMKM - UMK Jaminan Bersyarat - Penjamin Lainnya - Menengah	60
7.	Debitur UMKM - UMKM Lainnya - Mikro	70
8.	Debitur UMKM - UMKM Lainnya - Kecil	80
9.	Debitur UMKM - UMKM Lainnya - Menengah	90
10.	Bukan Debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	99

Sumber: Sistem informasi debitur (SID) Bank Indonesia

⁸ Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis profil Program KUR di Indonesia, di mana dalam program tersebut maksimal pinjaman yang diberikan oleh bank penyalur adalah sebesar Rp500 juta.

⁹ Sebagai gambaran jumlah nasabah/debitur UMKM dengan jaminan bersyarat (golongan kredit 10, 20 dan 30) yang memulai pinjaman pada bulan Mei 2013 hanya tercatat sebanyak 122 nasabah, padahal jumlah nasabah rata-rata pada bulan-bulan sebelumnya adalah lebih dari 120 ribu nasabah baru per bulan.

Penggunaan informasi golongan kredit untuk mengidentifikasi pinjaman KUR tersebut ternyata memiliki kelemahan. Penelitian lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa terdapat 6,7 persen pinjaman dari total observasi yang memiliki kode 10, 20 dan 30 yang telah diterima oleh debitur sebelum Program KUR diluncurkan, yaitu bulan November 2007 (Tabel 5). Hal ini mengindikasikan bahwa kode tersebut juga digunakan untuk jenis pinjaman lain selain KUR, sehingga sangat mungkin terjadi *overestimate* dalam pencatatan jumlah debitur KUR bila menggunakan data SID.

Tabel 5. Jumlah Nasabah dengan Golongan Kredit 10, 20 dan 30

	Golongan Kredit			Total	Persentase
	10	20	30		
Periode sebelum KUR diluncurkan	146	379.455	5	379.606	6,65%
Periode KUR (Nov 2007- April 2013)	2.580.196	2.745.629	1.934	5.327.759	93,35%
Total	2.580.342	3.125.084	1.939	5.707.365	100,00%

Sumber: Sistem informasi debitur (SID) Bank Indonesia, diolah

Di lain pihak, data debitur KUR dalam SID ternyata jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan data yang dipublikasikan oleh Komite KUR. Publikasi Komite KUR per April 2013 menunjukkan bahwa terdapat 8.325.686 debitur KUR, sementara jumlah debitur KUR selama periode November 2007–April 2013 hanya 5.327.759 debitur (Tabel 5). Perbedaan ini mungkin terjadi karena pencatatan pada Komite KUR adalah akumulasi jumlah nasabah tiap periode sehingga individu yang menerima KUR lebih dari sekali akan tercatat juga lebih dari sekali. Sebaliknya, data SID hanya mencatat posisi terakhir pinjaman nasabah, sehingga nasabah yang telah meminjam lebih dari satu kali hanya akan tercatat satu kali. Jika dugaan ini benar, maka ada sekitar 36 persen (2.997.927) dari data debitur yang tercatat di Komite KUR yang melakukan pinjaman lebih dari sekali. Lebih dari itu, sistem pencatatan di SID yang hanya menampilkan posisi terakhir ini membuat analisis perkembangan pinjaman dari debitur tidak bisa dilakukan.

Pembagian golongan kredit dalam SID juga ternyata tidak secara sempurna menggambarkan pembagian jenis kredit KUR. KUR pada awalnya membedakan jenis kredit menjadi dua jenis berdasarkan jumlah pinjaman, yaitu kredit mikro dan retail. KUR mikro merupakan jenis pinjaman dengan batas pinjaman sampai 5 juta rupiah, KUR Ritel adalah pinjaman dengan batas pinjaman dari 5 juta sampai 500 juta rupiah, sedangkan KUR Linkage diperuntukkan untuk pinjaman di atas 500 juta rupiah. Sejak bulan Januari 2010, batas atas KUR Mikro (yang juga merupakan batas bawah KUR Ritel) dinaikkan menjadi 20 juta rupiah dan diperkenalkan jenis kredit KUR baru yaitu KUR Linkage dengan batas pinjaman antara 500 juta rupiah sampai 2 miliar rupiah (Tabel 2). Di lain pihak, data SID membagi kelompok kredit berdasarkan batas pinjaman sampai 50 juta rupiah untuk mikro (kode 10), di atas 50 juta rupiah sampai 500 juta rupiah untuk kecil (kode 20) dan antara 500 juta rupiah sampai 2 miliar rupiah untuk menengah (kode 30).

Untuk dapat menggambarkan kondisi KUR secara lebih baik, maka pembagian jenis pinjaman KUR mengacu pada definisi yang digunakan oleh Komite KUR dengan menggunakan nilai plafon kredit dalam SID sebagai acuan. Namun demikian, karena data SID merupakan data yang menunjukkan posisi terakhir pinjaman, maka akan ada data dengan nilai plafon kredit dan/atau baki debit yang sama dengan 0 sehingga tidak bisa dikelompokkan (Tabel 6). Untuk menghindari banyaknya data yang tidak bisa didefinisikan, pembagian jenis pinjaman KUR dalam penelitian ini menggunakan nilai plafon kredit dan juga nilai baki debit yang ada dalam SID. Penggunaan salah satu dari kedua nilai tersebut dilakukan untuk saling melengkapi sehingga debitur yang tidak bisa dikelompokkan hanya 34.951 debitur.

Tabel 7, selanjutnya menunjukkan bagaimana kesesuaian antara pembagian kelompok berdasarkan definisi Bank Indonesia dan definisi dari KUR. Terlihat pada Tabel 7 bahwa perbedaan definisi tersebut membuat perbedaan yang cukup signifikan pada proporsi jenis pinjaman KUR dan proporsi pinjaman berdasarkan golongan kredit. Dengan menggunakan definisi golongan kredit yang digunakan oleh Bank Indonesia, terlihat bahwa terdapat 48,72 persen pinjaman mikro dan 51,24 persen pinjaman dengan golongan kredit menengah. Namun, jika definisi jenis pinjaman KUR yang digunakan maka terdapat 75,46 persen yang tergolong pinjaman mikro dan hanya 24,53 persen yang merupakan pinjaman retail. Tabel 6 juga menunjukkan bahwa meskipun data SID sudah dibatasi dengan jumlah plafon pinjaman maksimal 500 juta rupiah, namun ternyata terdapat debitur yang baki debetnya lebih besar dari 500 juta rupiah sehingga debitur tersebut bisa digolongkan dalam jenis pinjaman *linkage*¹⁰.

Tabel 7 juga menunjukkan bahwa masih terdapat debitur yang tidak bisa dikelompokkan. Eksplorasi lebih lanjut menunjukkan bahwa kelompok ini merupakan debitur dengan baki debit lebih dari 500 juta, namun sudah memulai pinjaman sebelum KUR dilaksanakan. Dengan keterbatasan tersebut, maka data yang akan digunakan dalam tulisan ini dibatasi pada kelompok golongan kredit 10, 20 dan 30 selama periode November 2007–April 2013 yang dapat dikelompokkan sesuai dengan jenis kredit KUR yaitu sebanyak 5.292.529 debitur.

Tabel 6. Jumlah Nasabah Berdasarkan Nilai Plafon dan Baki Debet

	Plafon kredit		Total
	Plafon > 0	Plafon = 0	
Baki debit > 0	5.190.988	15.110	5.206.098
Baki debit = 0	86.710	34.951	121.661
Total	5.277.698	50.061	5.327.759

Sumber: Sistem informasi debitur (SID) Bank Indonesia, diolah

¹⁰ Data SID untuk kelompok ini menunjukkan nilai plafon kredit sama dengan nol.

Tabel 7. Jumlah Debitur KUR Berdasarkan Golongan Kredit SID dan Jenis Pinjaman

Golongan Kredit	Jenis Pinjaman KUR				Total	Proporsi terhadap total (%)
	Mikro	Retail	Linkage	Tidak bisa dikelompokkan		
10	2.530.591	48.192	0	0	2.578.783	48,72
20	1.462.611	1.248.584	619	279	2.712.093	51,24
30	354	1.578	0	0	1.932	0,04
Total	3.993.556	1.298.354	619	279	5.292.808	100.0
Proporsi terhadap total ^c	75,46	24,53	0,01		100.0	

Sumber: Sistem informasi debitur (SID) Bank Indonesia, diolah.

Catatan:

^a Pembagian jenis pinjaman KUR dilakukan berdasarkan plafon kredit atau baki debit yang tercatat di SID.

^b Nilai plafon dan baki debit dari kelompok ini sama dengan nol, sehingga tidak bisa dikelompokkan.

^c Proporsi dihitung terhadap total data setelah dikurangi oleh data debitur yang tidak bisa dikelompokkan.

Terlepas dari kelemahan dari data SID tersebut, data ini merupakan satu-satunya sumber data mikro yang ada dan dapat diakses. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan karakteristik debitur KUR secara lebih mendetail. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan basis data KUR.

Profil Debitur KUR Berdasarkan Data SID

Berdasarkan data SID, yang telah dibersihkan pada bagian 3, analisis terhadap profil debitur KUR akan dibahas pada bagian ini. Analisis akan difokuskan pada lokasi debitur, sektor ekonomi debitur, plafon dan baki debit, periode pinjaman, suku bunga serta kelancaran pengembalian pinjaman. Analisis debitur KUR berdasarkan bank penyalur tidak dapat dilakukan karena informasi tersebut tidak tersedia dalam data yang diberikan oleh Bank Indonesia, meskipun sebenarnya data SID memiliki informasi mengenai bank pemberi pinjaman.

Lokasi Debitur KUR

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada periode November 2007–April 2013, kelompok sandi golongan kredit 10, 20, 30 yang tercatat di Sistem Informasi Debitur (SID) BI dan bisa dikelompokkan sebagai debitur program KUR adalah 5.292.529 orang. Dirinci menurut jenis KUR, sekitar 75,5 persen adalah debitur KUR Mikro, sedangkan 24,5 persen merupakan debitur KUR Ritel. Sementara itu, debitur KUR Linkage memiliki proporsi yang tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan debitur di 2 jenis KUR lainnya, tercatat hanya 619 orang (Tabel 8).

Bila dirinci menurut lokasi geografis, sebagaimana data yang dipublikasikan Komite Kebijakan KUR, Tabel 8 juga memperlihatkan bahwa program penyaluran KUR cenderung tidak terdistribusi secara merata ke seluruh provinsi. Sekitar 63 persen dari total debitur bertempat tinggal di Pulau Jawa, di mana Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak menjadi tempat tinggal debitur (17,8 persen). Dengan demikian, dalam konteks distribusi debitur, provinsi luar Pulau Jawa, hanya menyerap 37 persen debitur.

TNP2K (2015) menggarisbawahi bahwa terlepas dari fakta secara agregat UMKM sebagai calon debitur KUR di Pulau Jawa relatif lebih banyak dibandingkan dengan UMKM di luar Jawa, terbatasnya lembaga keuangan, seperti unit dan cabang bank pelaksana, di beberapa provinsi luar Pulau Jawa kemungkinan juga berkontribusi terhadap tidak terdistribusinya KUR secara proporsional ke seluruh provinsi. Terbatasnya unit dan cabang bank pelaksana ini membuat UMKM di beberapa provinsi luar Pulau Jawa kesulitan untuk mengakses program KUR. Kenyataan ini penting menjadi bahan pertimbangan karena UMKM di provinsi luar Jawa cenderung memproduksi barang dengan memanfaatkan sumber daya dan karakter lokal yang lebih kental dibandingkan dengan UMKM di Jawa (Adam 2009). Penggunaan sumber daya dan karakter lokal ini menjamin keuntungan dari proses nilai tambah bisa secara optimal dinikmati oleh bangsa ini.

Sektor Ekonomi

Secara sektoral, pola distribusi KUR versi SID dan versi Komite Kebijakan KUR juga tidak jauh berbeda. Seperti data Komite Kebijakan KUR, data SID juga menunjukkan sektor perdagangan sebagai sektor yang paling banyak menerima manfaat KUR, menyerap hampir 34 persen dari total penyaluran KUR (Tabel 9).

Yang menarik adalah ternyata proporsi debitur KUR di sektor pertanian relatif lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi debitur KUR di sektor industri pengolahan. Padahal selama ini ada anggapan bahwa risiko gagal bayar penyaluran KUR di sektor pertanian relatif lebih tinggi dibandingkan dengan di sektor-sektor lainnya tidak saja karena masalah pada saat budidaya (gagal panen), tetapi juga pada saat pemasaran (penurunan harga). Selain itu, cara pembayaran bulanan model perbankan kurang sesuai dengan pendapatan pelaku usaha di sektor pertanian yang cenderung bersifat musiman.

Tabel 8. Jumlah Debitur Berdasarkan Provinsi dan Kelompok Pinjaman KUR

	KUR Mikro	KUR Ritel	KUR Linkage	Total Nasabah	Persentase (%)
Nanggroe Aceh Darussalam	54.972	33.568	0	88.540	1,7
Sumatra Utara	185.060	45.780	23	230.863	4,4
Sumatra Barat	93.713	32.179	0	125.892	2,4
Riau	90.413	28.208	0	118.621	2,2
Jambi	65.498	20.365	0	85.863	1,6
Sumatra selatan	96.429	34.940	0	131.369	2,5
Bengkulu	28.343	11.595	0	39.938	0,8
Lampung	69.424	17.455	0	86.879	1,6
Kepulauan Bangka Belitung	13.736	4.200	0	17.936	0,3
Kepulauan Riau	17.716	24.533	2	42.251	0,8
Jakarta	300.586	181.953	487	483.026	9,1
Jawa Barat	647.768	292.471	66	940.305	17,8
Jawa Tengah	725.356	88.924	1	814.281	15,4
DI Jogjakarta	94.395	10.824	0	105.219	2
Jawa Timur	577.075	143.299	11	720.385	13,6
Banten	182.494	80.728	25	263.247	5
Bali	76.416	21.396	0	97.812	1,8
Nusa Tenggara Barat	57.758	17.792	0	75.550	1,4
Nusa Tenggara Timur	37.940	8.923	0	46.863	0,9
Kalimantan Barat	39.663	17.761	0	57.424	1,1
Kalimantan Tengah	27.446	9.466	0	36.912	0,7
Kalimantan Selatan	63.154	22.887	0	86.041	1,6
Kalimantan Timur	59.823	24.883	0	84.706	1,6
Sulawesi Utara	45.863	12.935	0	58.798	1,1
Sulawesi Tengah	47.616	11.896	0	59.512	1,1
Sulawesi Selatan	178.168	45.510	3	223.681	4,2
Sulawesi Tenggara	32.643	11.764	0	44.407	0,8
Gorontalo	21.956	7.154	0	29.110	0,6
Sulawesi Barat	13.515	2.339	0	15.854	0,3
Maluku	16.700	10.449	0	27.149	0,5
Maluku Utara	8.236	2.960	0	11.196	0,2
Papua Barat	8.238	3.755	1	11.994	0,2
Papua	15.253	15.423	0	30.676	0,6
Di Luar Indonesia	190	39	0	229	0
Total	3.993.556	1.298.354	619	5.292.529	100

Sumber: Sistem informasi debitur (SID) Bank Indonesia, diolah.

Tabel 9 juga memperlihatkan tingginya proporsi KUR di sektor yang tidak terdefinisikan (lainnya). Terdapat beberapa kemungkinan mengapa KUR di sektor yang tidak terdefinisikan (lainnya) lebih tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. *Pertama*, perbankan tidak terlalu peduli dengan pengelompokan sektoral. Perbankan lebih memprioritaskan pengajuan suatu kredit dari sisi *bankable* atau *unbankable*, sedangkan mengelompokkan pengajuan kredit ke dalam sektor tertentu tidak/kurang menjadi prioritas.

Kedua, munculnya aktivitas ekonomi baru yang masih sulit untuk dikelompokkan di satu sektor tertentu. Misalnya, perbankan kesulitan mengategorikan kerajinan batu cincin yang justru akhir-akhir ini muncul sebagai aktivitas ekonomi baru. Belum ada kesepakatan antar perbankan apakah kerajinan batu cincin masuk ke dalam kategori pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, atau jasa.

Tabel 9. Jumlah Debitur Berdasarkan Sektor Usaha dan Kelompok Pinjaman KUR (%)

	KUR Mikro	KUR Ritel	KUR Linkage	Total
Pertanian	7	1,5	0	5,7
Perikanan	0,6	0,1	7,4	0,5
Pertambangan	0	0	9,9	0
Industri pengolahan	1,6	0,7	62,2	1,4
Listrik, gas dan air	0	0	0	0
Konstruksi	0	0,2	3,2	0,1
Perdagangan	41,7	8,3	7,8	33,5
Penyediaan akomodasi(Hotel)	0	0	0	0
Transportasi dan Komunikasi	0,4	0,1	0	0,3
Jasa dunia usaha	2,7	2,3	7,6	2,6
Jasa sosial/masyarakat - Kesehatan	0	0,1	0	0,1
Jasa sosial/masyarakat – Pendidikan	0,1	0,2	0	0,1
Jasa sosial/masyarakat - lainnya	0,4	0,4	0	0,4
Lainnya	45,3	86	1,9	55,3
Total	100	100	100	100

Sumber: Sistem informasi debitur (SID) Bank Indonesia, diolah.

Plafon dan Baki Debet

Pada periode November 2007 sampai dengan April 2013, total plafon pinjaman untuk 5.292.529 debitur berjumlah Rp142.820.362 juta (Tabel 10) dengan baki debet (*outstanding debt*) sekitar Rp138.480.760 (Tabel 11). Mengikuti pola penyebaran debitur, Pulau Jawa menjadi penyerap plafon pinjaman dan baki debet terbesar.

Dalam kaitan dengan plafon pinjaman, Tabel 10 menunjukkan sekitar 59,4 persen dari total plafon pinjaman diserap oleh Pulau Jawa, sedikit lebih kecil dibandingkan dengan konsentrasi debitur di Pulau itu, sebesar 63 persen (Tabel 8). Yang menarik adalah, kecuali di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, rata-rata plafon kredit per debitur di provinsi Pulau Jawa lainnya, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata secara nasional. Hal ini kemungkinan menjadi penyebab mengapa proporsi penyerapan plafon kredit di Pulau Jawa tidak setinggi seperti proporsi debiturnya.

Tabel 10 juga memperlihatkan bahwa plafon kredit per debitur menurut jenis KUR (Mikro, Retail, dan *Linkage*) bervariasi diantara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Secara umum, rata-rata plafon kredit per debitur menurut jenis KUR masih jauh dari batas atas yang ditetapkan pemerintah. Misalkan, secara rata-rata plafon kredit per debitur untuk KUR Mikro ada di rentang Rp7,3 juta (Gorontalo) sampai dengan Rp13 juta (Papua), masih jauh dari batas plafon maksimal KUR Mikro sebesar Rp20 juta per debitur. Demikian halnya, rata-rata plafon kredit per debitur untuk KUR Ritel berada di kisaran Rp67,2 juta (Maluku) sampai dengan Rp102,9 (Kalimantan Timur), jauh di bawah plafon maksimal KUR Ritel, yaitu Rp500 juta per debitur.

Tabel 10. Jumlah dan Rata-rata Plafon Kredit Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kredit

	Jumlah Plafon kredit (Rp Juta)	Rata-rata Plafon kredit (Rp Juta)	
		KUR Mikro	KUR Ritel
Nanggroe Aceh Darussalam	3.696.418	8,8	95,7
Sumatra Utara	5.617.380	9,2	85,4
Sumatra Barat	3.848.923	11,1	87,3
Riau	3.613.407	11,3	91,8
Jambi	2.310.170	9,6	82,6
Sumatra selatan	3.732.378	9,2	81,5
Bengkulu	1.226.639	9,8	81,8
Lampung	2.005.483	8,9	79,4
Kepulauan Bangka Belitung	508.630	11	85,1
Kepulauan Riau	2.215.007	10	83,1
Jakarta	18.010.210	9,9	82,7
Jawa Barat	27.312.537	8,1	75,5
Jawa Tengah	12.684.158	7,8	79
DI Jogjakarta	1.643.242	7,9	83,3
Jawa Timur	17.098.741	8,6	84,5
Banten	8.063.853	8,3	81,2
Bali	2.788.629	10,9	91,3
Nusa Tenggara Barat	2.103.822	8,9	89,3
Nusa Tenggara Timur	981.672	8,8	72,4
Kalimantan Barat	1.907.949	10,7	83,5
Kalimantan Tengah	1.186.171	11,6	91,7
Kalimantan Selatan	2.910.470	9,8	100,1
Kalimantan Timur	3.200.152	10,7	102,9
Sulawesi Utara	1.434.253	8,4	81,2
Sulawesi Tengah	1.341.801	9,3	75,6
Sulawesi Selatan	6.037.043	10	93,4
Sulawesi Tenggara	1.304.637	10,4	82
Gorontalo	675.571	7,3	72,1
Sulawesi Barat	343.762	9,4	92,7
Maluku	904.593	12,1	67,2
Maluku Utara	359.916	12	88,2
Papua Barat	445.557	12,1	92
Papua	1.296.326	13	71,2
Di Luar Indonesia	10.865	3,6	261,3
Total	142.820.362	8,9	82,6

Sumber: Sistem informasi debitur (SID) Bank Indonesia, diolah.

Tabel 11. Jumlah dan Rata-rata Baki Debit Berdasarkan Provinsi dan Jenis Kredit

	Jumlah Baki Debit (Rp Juta)	Rata-rata Baki Debit (Rp Juta)		
		KUR Mikro	KUR Ritel	KUR Linkage
Nanggroe Aceh Darussalam	3.142.982,3	5,4	84,9	-
Sumatra Utara	4.814.199,3	6,4	76,7	4.810
Sumatra Barat	3.103.560,9	7,1	75,9	-
Riau	3.014.459,6	7,4	83,1	-
Jambi	1.917.483,2	6,4	73,7	-
Sumatra selatan	3.082.003,6	6,1	71,5	-
Bengkulu	1.015.077,7	6,3	72	-
Lampung	1.715.306,9	6,6	72	-
Kepulauan Bangka Belitung	415.288,0	6	79,1	-
Kepulauan Riau	1.969.319,6	6,6	71,2	52.974
Jakarta	32.612.361,8	6,7	75,9	34.463
Jawa Barat	24.623.082,7	5,9	69,1	8.433
Jawa Tengah	10.086.071,3	5,5	68,3	1.501
DI Jogjakarta	1.313.434,9	5,5	73	-
Jawa Timur	14.566.903,3	6,2	72,9	48.294
Banten	7.446.229,2	6,8	74,6	7.500
Bali	2.285.581,7	6,9	82,2	-
Nusa Tenggara Barat	1.759.117,3	6,3	78,4	-
Nusa Tenggara Timur	734.836,0	5,7	58,3	-
Kalimantan Barat	1.537.854,0	6,4	72,2	-
Kalimantan Tengah	953.421,0	7,2	79,9	-
Kalimantan Selatan	2.476.377,6	6,3	90,8	-
Kalimantan Timur	2.724.671,6	6,7	93,4	-
Sulawesi Utara	1.167.098,5	5,3	71,6	-
Sulawesi Tengah	1.074.605,2	6,2	65,6	-
Sulawesi Selatan	5.029.073,8	6,8	83,2	9.074
Sulawesi Tenggara	1.037.042,0	6,5	70,2	-
Gorontalo	544.268,3	4,6	62,1	-
Sulawesi Barat	274.057	6,2	81,5	-
Maluku	720.674,9	7,9	56,4	-
Maluku Utara	270.742,6	6,7	72,9	-
Papua Barat	288.355,2	7,3	60,6	724
Papua	755.376,4	7,8	41,3	-
Di Luar Indonesia	9.842,3	3,5	235,3	-
Total	138.480.759,9	6,2	73,5	29.572

Sumber: Sistem informasi debitur (SID) Bank Indonesia, diolah.

Terdapat beberapa kemungkinan mengapa plafon kredit per debitur untuk semua sandi golongan kredit jauh lebih rendah dibandingkan dengan plafon maksimal yang ditetapkan pemerintah. **Pertama**, secara riil kebutuhan dan permintaan kredit dari UKM memang lebih rendah dari plafon kredit maksimal yang ditetapkan pemerintah. **Kedua**, kesalahan administrasi pencatatan baik di tingkat bank pelaksana ataupun pada saat data dari tiap-tiap bank pelaksana di agregasi di BI. Petunjuk pelaksanaan pencatatan

bagaimana mengelompokkan tiap pinjaman ke dalam sandi golongan kredit tertentu yang disertai dengan mekanisme *check* dan *recheck*, baik di level bank pelaksana maupun di BI diperkirakan akan mengurangi permasalahan ini.

Terlepas dari masalah di atas, perbandingan antara plafon pinjaman dengan baki debit menunjukkan bahwa masih ada alokasi pinjaman yang belum ditarik UKM sebesar Rp4,3 triliun. Kecuali di DKI Jakarta, hampir semua provinsi masih memiliki alokasi pinjaman KUR yang belum tersalur. Aceh menjadi provinsi yang memiliki selisih plafon pinjaman dengan baki debit terbesar, mengindikasikan kemampuan bank pelaksana di daerah itu untuk menyalurkan pinjaman KUR tidak setinggi seperti bank pelaksana di provinsi-provinsi lainnya.

Penting untuk dikemukakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara data SID dan data KUR dari Komite Kebijakan KUR. Berbeda dari data SID, data Komite Kebijakan KUR selalu menunjukkan bahwa plafon pinjaman selalu lebih rendah dari baki debit (*outstanding debt*). Dengan komposisi seperti itu, tidak terlalu mengherankan jika target penyaluran KUR cenderung lebih rendah dibandingkan dengan realisasi penyalurannya.

Berkaca dari perbedaan itu, paling tidak ada dua kemungkinan penting yang muncul. **Pertama**, data dari Komite Kebijakan KUR *over reported*; **Kedua**, atau sebaliknya justru data SID yang *under reported*. Penelitian yang lebih komprehensif untuk mengonfirmasi dua pertanyaan itu menjadi penting untuk dilakukan di masa yang akan datang.

Periode Pinjaman

Dalam kurun waktu 2007–2013, pola penyaluran KUR cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode pengamatan (2007–2013), tahun 2012 menjadi puncak penyaluran di mana pada tahun itu tersalur sekitar 42,4 persen dari total akumulasi penyaluran KUR selama 2007–2013. Tahun 2013, penyaluran KUR menurun drastis ke level 14,7 persen (Tabel 12). Penurunan itu masih masuk akal karena data pada 2013 hanya sampai April.

Tabel 12. Perkembangan Jumlah Nasabah Menurut Tahun Mulai Pinjaman dan Jenis Pinjaman

Tahun Awal Pinjaman	Jenis Pinjaman			Total	Persentase	Lama pinjaman Maksimum (tahun)
	KUR Mikro	KUR Ritel	KUR Linkage			
2007	2.245	16.606	-	18.851	0,4	30
2008	232.410	123.311	-	355.721	6,7	41
2009	106.217	126.993	-	233.210	4,4	32
2010	212.105	207.258	-	419.363	7,9	33
2011	991.009	250.810	25	1.241.844	23,5	35
2012	1.816.409	429.627	403	2.246.439	42,4	36
2013	633.161	143.749	191	777.101	14,7	28
Total	3.993.556	1.298.354	619	5.292.529	100	41

Sumber: Sistem informasi debitur (SID) Bank Indonesia, diolah.

Namun demikian, mencermati data mengenai tahun akhir pinjaman, kualitas, validitas, dan realibilitas dari data SID tidak cukup meyakinkan. Menurut tata pelaksanaan program KUR, tenor pinjaman untuk kredit modal kerja dan kredit investasi, masing-masing tiga dan lima tahun. Jika ada perpanjangan (suplesi) dan restrukturisasi pinjaman, maka tenor pinjaman kredit modal kerja menjadi enam tahun, sedangkan untuk kredit investasi menjadi 10 tahun.

Mengacu kepada tata pelaksanaan program KUR, dengan asumsi pinjaman dimulai tahun 2013, melalui skema kredit investasi dan diberikan suplesi, maka tahun akhir pinjaman seharusnya ada di Tahun 2023 (10 tahun). Namun demikian, sebagaimana bisa dilihat di Tabel 12, pinjaman yang dimulai tahun 2013, ada yang lama pinjamannya adalah 28 tahun (akhir pinjamannya sampai dengan Tahun 2041). Bahkan, untuk pinjaman yang dimulai tahun 2008 terdapat pinjaman yang tenornya adalah 41 tahun (akhir pinjamannya adalah Tahun 2049). Hal ini menunjukkan bahwa tenor beberapa pinjaman sama sekali tidak sesuai dengan tata pelaksanaan program KUR. Periode pinjaman, tidak lagi 10 tahun seperti tenor maksimal pinjaman program KUR (kredit investasi dan diberikan suplesi), tetapi ada yang sampai dengan 41 tahun.

Kesalahan dalam pencatatan dan pengelompokan satu kredit ke dalam kelompok KUR mungkin menjadi salah satu penyebab mengapa tenor pinjaman maksimal dari data SID tidak sesuai dengan tata pelaksanaan program KUR. Dalam kaitan ini, ada baiknya diterbitkan buku panduan dengan kategorisasi yang jelas apa yang bisa dan tidak bisa dicatat sebagai pinjaman dalam kategori KUR. Buku panduan itu harus menjadi salah satu fondasi untuk menyusun *management information system* (MIS) dari database KUR.

Suku Bunga

Tata pelaksanaan program KUR mengatur bahwa suku bunga KUR Mikro yang pada tahun 2007 ditetapkan sebesar 24 persen, sejak tahun 2012 diturunkan menjadi 22 persen. Demikian halnya, suku bunga KUR Ritel yang pada tahun 2007 ditetapkan 16 persen, sejak tahun 2012 diturunkan menjadi 14 persen. Untuk KUR Linkage, suku bunganya mengikuti suku bunga KUR Mikro (Tabel 3).

Kecuali untuk KUR Ritel, suku bunga kredit yang tercatat di SID untuk KUR Mikro dan KUR Linkage cenderung berbeda dengan aturan tata pelaksanaan program KUR. Secara rata-rata, pada periode November 2007 sampai dengan April 2013, suku bunga KUR Mikro adalah 14 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tata pelaksanaan program KUR, sebesar 22 persen. Demikian juga, pada periode 2011–2013, rata-rata suku bunga KUR Linkage hanya 5,3 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan aturan yang ditetapkan, sebesar 22 persen (Tabel 13).

Tabel 13. Rata-rata Tingkat Suku Bunga Berdasarkan Jenis dan Tahun Mulai Pinjaman

Tahun Awal Pinjaman	Jenis Pinjaman KUR			Total
	Mikro	Ritel	<i>Linkage</i>	
2007	30,2	15,9	-	17,6
2008	14,4	16	-	15
2009	15,6	16,4	-	16
2010	15,1	13,7	-	14,4
2011	15,1	12,9	5,7	14,6
2012	13,4	13,3	6,7	13,4
2013	13,6	14,6	2,2	13,8
Total	14,00	14,00	5,30	14,00

Sumber: Sistem informasi debitur (SID) Bank Indonesia, diolah.

Data SID juga menunjukkan terdapat variasi rata-rata suku bunga untuk seluruh jenis KUR antarprovinsi (Tabel 14). Permasalahannya adalah aturan tata pelaksanaan program KUR berlaku sama di seluruh Indonesia. Artinya, bunga KUR Mikro yang ditetapkan satu bank pelaksana di Jakarta seharusnya akan persis sama dengan bunga KUR Mikro yang ditetapkan bank pelaksana lainnya di Jayapura.

Perbedaan suku bunga dari setiap jenis KUR antarprovinsi juga cenderung bervariasi. Untuk KUR Mikro, variasinya sekitar empat persen, berada dalam rentang 12,5 persen (Aceh) sampai dengan 16,5 persen (Banten). Sementara untuk KUR Ritel, variasinya sekitar tujuh persen berada pada rentang 10 persen (Aceh) sampai dengan 17 persen (Jakarta).

Tabel 14. Rata-rata Tingkat Suku Bunga Berdasarkan Jenis Pinjaman dan Provinsi

Provinsi	Jenis Pinjaman KUR			
	Mikro	Ritel	Linkage	Total
Nanggroe Aceh Darussalam	12,5	10	-	11,5
Sumatra Utara	14	15,2	5,6	14,2
Sumatra Barat	12,5	11,9	-	12,3
Riau	13,9	13	-	13,7
Jambi	13,4	11,6	-	13
Sumatra selatan	14,7	13	-	14,3
Bengkulu	13,7	12,6	-	13,4
Lampung	14	12,8	-	13,7
Kepulauan Bangka Belitung	13,9	11,2	-	13,2
Kepulauan Riau	14	12,3	1	13
Jakarta	16,3	17	5,5	16,5
Jawa Barat	15	14	3,8	14,7
Jawa Tengah	13,4	13,7	0	13,4
DI Jogjakarta	13,2	13,2	-	13,2
Jawa Timur	13,8	14,7	8,2	14
Banten	16,5	15	4,9	16,1
Bali	13,2	16,2	-	13,9
Nusa Tenggara Barat	12,8	11,4	-	12,5
Nusa Tenggara Timur	12,9	13,7	-	13,1
Kalimantan Barat	12,5	12,5	-	12,5
Kalimantan Tengah	12,8	11,8	-	12,5
Kalimantan Selatan	12,9	11,9	-	12,6
Kalimantan Timur	13,1	12,2	-	12,8
Sulawesi Utara	13,2	12	-	12,9
Sulawesi Tengah	12,9	13,2	-	12,9
Sulawesi Selatan	13,1	12,7	3	13
Sulawesi Tenggara	12,6	11,4	-	12,3
Gorontalo	13,1	12,6	-	13
Sulawesi Barat	12,7	11,3	-	12,5
Maluku	12,8	13,2	-	12,9
Maluku Utara	12,8	12,4	-	12,7
Papua Barat	12,7	13,9	13	13,1
Papua	12,6	13,6	-	13,1
Di Luar Indonesia	1,5	5,9	-	2,3
Total	14	14	5,3	14

Sumber: Sistem informasi debitur (SID) Bank Indonesia, diolah.

Kelancaran Pengembalian Pinjaman

Tingkat kemacetan pengembalian pinjaman program KUR menurut SID relatif tinggi. Dari total pinjaman, sekitar 13,9 persen mengalami keterlambatan pengembalian selama sedikitnya 6 bulan, lebih tinggi dari NPL (*non-performing loans*) yang dilaporkan oleh Komite Kebijakan KUR, sekitar 4,2 persen. Di beberapa daerah, seperti Sulawesi Utara (34,6 persen), Gorontalo (27,3 persen), Sulawesi Barat (23,6 persen), Maluku Utara (21,4 persen), dan Nusa Tenggara Timur (20,5 persen), keterlambatan pengembalian selama sedikitnya 6 bulan ini bahkan lebih dari 20 persen dari total pinjaman (Tabel 15).

Tabel 15. Jumlah Nasabah Berdasarkan Status Kolektibilitas dan Provinsi

	Lancar	Macet	Total	Persentase Macet
Nanggroe Aceh Darussalam	70.996	17.544	88.540	19,8
Sumatra Utara	188.009	42.854	230.863	18,6
Sumatra Barata	112.033	13.859	125.892	11
Riau	107.442	11.179	118.621	9,4
Jambi	73.110	12.753	85.863	14,9
Sumatra Selatan	114.485	16.884	131.369	12,9
Bengkulu	35.527	4.411	39.938	11
Lampung	78.979	7.900	86.879	9,1
Kepulauan Bangka Belitung	15.529	2.407	17.936	13,4
Kepulauan Riau	40.263	1.988	42.251	4,7
Jakarta	420.802	62.224	483.026	12,9
Jawa Barat	807.472	132.833	940.305	14,1
Jawa tengah	701.422	112.859	814.281	13,9
DI Yogyakarta	90.222	14.997	105.219	14,3
Jawa Timur	630.757	89.628	720.385	12,4
Banten	239.058	24.189	263.247	9,2
Bali	84.139	13.673	97.812	14
Nusa Tenggara Barat	67.034	8.516	75.550	11,3
Nusa Tenggara Timur	37.254	9.609	46.863	20,5
Kalimantan Barat	48.353	9.071	57.424	15,8
Kalimantan Tengah	31.880	5.032	36.912	13,6
Kalimantan Selatan	74.316	11.725	86.041	13,6
Kalimantan Timur	74.784	9.922	84.706	11,7
Sulawesi Utara	38.468	20.330	58.798	34,6
Sulawesi Tengah	48.526	10.986	59.512	18,5
Sulawesi Selatan	183.327	40.354	223.681	18
Sulawesi Tenggara	37.293	7.114	44.407	16
Gorontalo	21.159	7.951	29.110	27,3
Sulawesi Barat	12.113	3.741	15.854	23,6
Maluku	23.455	3.694	27.149	13,6
Maluku Utara	8.802	2.394	11.196	21,4
Papua Barat	10.277	1.717	11.994	14,3
Papua	28.662	2.014	30.676	6,6
Diluar Indonesia	229	-	229	0
Total	4.556.177	736.352	5.292.529	13,9

Sumber: Sistem informasi debitur (SID) Bank Indonesia, diolah.

Jika Tabel 10 dan Tabel 15 diperbandingkan, terdapat indikasi bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara besar atau kecilnya plafon pinjaman dengan tinggi dan rendahnya tingkat keterlambatan pengembalian pinjaman. Misalnya, dari sisi plafon pinjaman, porsi plafon pinjaman di Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara, relatif sangat kecil masing-masing hanya 0,9 persen, 0,6 persen, 0,3 persen, dan 0,2 persen dari total plafon pinjaman di seluruh Indonesia (Tabel 10). Namun demikian, porsi kredit bermasalah (keterlambatan pengembalian selama sedikitnya 6 bulan) di daerah tersebut di atas relatif tinggi.

Di sisi yang lain, plafon pinjaman di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, relatif tinggi masing-masing mencapai angka 17,8 persen, 15,4 persen, dan 13,6 persen dari total plafon pinjaman di Indonesia (Tabel 10). Sementara itu, tingkat keterlambatan pengembalian pinjaman (selama sedikitnya enam bulan di provinsi itu hanya 14,1 persen (Jawa Barat), 13,9 persen (Jawa Tengah), dan 12,4 persen (Jawa Timur), relatif lebih rendah dibandingkan dengan provinsi yang proporsi plafon pinjaman KUR-nya relatif kecil.

Dirinci menurut jenis KUR, kredit bermasalah (keterlambatan pengembalian selama sedikitnya enam bulan) paling tinggi terjadi di KUR Mikro. Sebagaimana bisa di lihat di Tabel 16, kredit bermasalah di KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR Linkage masing-masing 15,7 persen, 8,6 persen, dan 0,2 persen.

Tingginya kredit bermasalah di KUR Mikro merupakan indikasi bahwa menyalurkan kredit mikro dengan nominal kredit yang relatif kecil ke nasabah (UKM) yang relatif banyak memang risikonya cukup tinggi. Bank pelaksana perlu memiliki pengalaman, struktur organisasi, dan sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar memahami karakter kredit mikro. Tidak semua bank mampu berperan sebagai penyalur kredit mikro. Karena itu, bank pelaksana KUR, khususnya KUR Mikro, idealnya memiliki standar tertentu. Proses untuk menyeleksi bank pelaksana berdasarkan kriteria, seperti kemampuan keuangan, pemahaman dan pengalaman sebagai penyalur kredit mikro, dan kualitas SDM, menjadi penting untuk meminimalkan kredit bermasalah.

Tabel 16. Jumlah Nasabah Berdasarkan Status Kolektibilitas dan Jenis Pinjaman

Jenis Pinjaman	Lancar	Macet	Total	Persentase Macet
KUR Mikro	3.368.547	625.009	3.993.556	15,7
KUR Ritel	1.187.012	111.342	1.298.354	8,6
KUR Linkage	618	1	619	0,2
Total	4.556.177	736.352	5.292.529	13,9

Sumber: Sistem informasi debitur (SID) Bank Indonesia, diolah.

Secara sektoral, kredit bermasalah ternyata justru banyak terjadi di sektor perdagangan dan industri. Sekitar 28 persen dari total pinjaman di sektor perdagangan berkategori kredit bermasalah (terjadi keterlambatan pengembalian selama sedikitnya enam bulan), sedangkan di sektor industri mencapai angka 12,6 persen (Tabel 17).

Di sektor pertanian, kredit bermasalah mencapai angka 12,2 persen dari total kredit di sektor itu, sangat tinggi tetapi relatif lebih baik dibandingkan dengan kredit bermasalah di sektor perdagangan dan industri. Relatif lebih rendahnya proporsi kredit bermasalah di sektor pertanian bertolak belakang dengan persepsi yang berkembang selama ini bahwa risiko terjadinya kredit bermasalah di sektor ini lebih tinggi dengan risiko di sektor perdagangan dan industri.

Tabel 17. Jumlah Nasabah Berdasarkan Status Kolektibilitas dan Sektor Usaha

Sektor	Lancar	Macet	Total	Persentase Macet
Pertanian	263.566	36.770	300.336	12,2
Perikanan	21.153	3.250	24.403	13,3
Pertambangan	1.276	101	1.377	7,3
Industri pengolahan	63.440	9.145	72.585	12,6
Listrik, gas dan air	812	40	852	4,7
Konstruksi	3.625	349	3.974	8,8
Perdagangan	1.276.859	496.806	1.773.665	28
Penyediaan akomodasi(Hotel)	700	93	793	11,7
Tansportasi dan Komunikasi	14.655	1.514	16.169	9,4
Jasa dunia usaha	122.307	17.011	139.318	12,2
Jasa sosial/masyarakat - Kesehatan	2.599	109	2.708	4
Jasa sosial/masyarakat - Pendidikan	5.541	234	5.775	4,1
Jasa sosial/masyarakat - lainnya	22.455	923	23.378	3,9
Lainnya	2.757.189	170.007	2.927.196	5,8
Total	4.556.177	736.352	5.292.529	13,9

Sumber: Sistem informasi debitur (SID) Bank Indonesia, diolah.

Rekomendasi

SID merupakan salah satu sumber data yang memuat informasi mengenai status pinjaman oleh debitur di seluruh Indonesia, termasuk lokasi debitur, lokasi usaha, bidang usaha, sektor ekonomi, plafon dan baki debet, tanggal mulai dan jatuh tempo pinjaman, tingkat suku bunga serta status kelancaran pengembalian pinjaman. Karena itu, SID bisa dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan untuk menganalisis dinamika berbagai program kredit pemerintah, termasuk KUR.

Dalam kaitan dengan KUR, SID bisa digunakan untuk memberi gambaran secara deskriptif mengenai profil debitur KUR. SID juga bisa digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi perubahan di dalam aturan-aturan KUR, seperti tingkat bunga, plafon kredit, ataupun implementasi sistem targeting. Demikian juga, SID bisa digunakan untuk mengevaluasi dampak dari program KUR terhadap kondisi sosial ekonomi debitur, sekaligus memberikan gambaran mengenai efektif atau tidaknya program KUR mencapai tujuannya (pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas UMKM dalam menciptakan kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi RTM).

Namun demikian, jika dibandingkan dengan data KUR dari Komite Kebijakan KUR, analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan, untuk beberapa kasus SID cenderung *under reported* (kemungkinan karena data SID hanya menampilkan posisi akhir pinjaman), dan untuk beberapa kasus lainnya cenderung *over reported* (karena kode dalam SID mungkin mencakup jenis pinjaman selain KUR). Selain itu, dengan menjadikan aturan KUR sebagai kerangka acuan, beberapa poin dari SID (seperti tingkat bunga dan tenor waktu pinjaman), cenderung berbeda dari aturan yang ditetapkan.

Agar SID bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai basis data untuk menganalisis secara lebih valid mengenai profil debitur KUR, perubahan kebijakan, dan dampak dari kebijakan KUR terhadap pemberdayaan UKM, penciptaan kesempatan kerja, dan pengurangan kemiskinan, manajemen pengumpulan dan pengelolaan SID perlu mendapat perbaikan. Beberapa rekomendasi perbaikan pengumpulan dan pengelolaan SID adalah sebagai berikut (Tabel 18)

Tabel 18. Rekomendasi Perbaikan SID

Isu	Rekomendasi
Pengumpulan data	<ul style="list-style-type: none">• Definisi sektoral perlu diperjelas dan lebih rinci sehingga lebih mudah dipahami perbankan.• Sosialisasi kepada perbankan mengenai definisi tiap sektor ekonomi perlu lebih diintensifkan dengan membuka peluang timbal balik (masukan) dari perbankan.
Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none">• KUR sebaiknya diberikan kode tersendiri yang berbeda dengan kode kredit mikro lainnya.• Otoritas pengelola SID (BI) perlu memiliki divisi tersendiri yang bertugas untuk melakukan check dan recheck terhadap data yang diinput perbankan.• Tersedianya beberapa informasi mengenai sejarah pinjaman nasabah, seperti berapa kali meminjam, rata-rata pinjaman, serta suku bunga.
Integrasi data	<ul style="list-style-type: none">• Data KUR sebaiknya bersifat unified dengan mengintegrasikan data yang dimiliki BI (SID), Jamkrindo, Askrindo, dan Komite Kebijakan KUR.

Beberapa rekomendasi seperti di Tabel 18 mengharuskan otoritas pengelola SID (BI) melakukan investasi karena otoritas itu perlu mengalokasikan SDM yang secara khusus bertanggung jawab terhadap proses pengumpulan dan pengelolaan data. Namun demikian, mengingat pentingnya ketersediaan data yang *valid* dan *reliable*, maka investasi itu diperkirakan akan lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Daftar Pustaka

Adam, L. 2009. *The Economic Role of Interfirm Networks in the Development of SM*. Lambert Academic Publishing. Herstellung.

P2E LIPI. 2012. *KUR di Era Otonomi Daerah: Membangun Sinergi antara Kelembagaan Pasar; Pemerintah Daerah dan Komunitas dalam Pengelolaan Kredit Program untuk Pemberdayaan UMKM*. Jakarta : P2E-LIPI.

TNP2K.2014. *An Analysis on the Impact of the Increasing Number of Participating Banks that Provide the KUR Mikro Loans*. Jakarta : TNP2K.

TNP2K.2013. *Kredit Usaha Rakyat untuk Sektor Prioritas*. Jakarta :TNP2K.

Kartika, J. 2012. *Evaluasi Kredit Usaha Rakyat*, Jakarta: TNP2K.

Seri Kertas Kerja TNP2K

	Judul	Penulis	Tanggal Terbit	Kata Kunci
Kertas Kerja 1	Finding the Best Indicators to Identify the Poor	Adama Bah	September 2013	Proxy-Means Testing, Variable/ Model Selection, Targeting, Poverty, Social Protection
Kertas Kerja 2	Estimating Vulnerability to Poverty using Panel Data: Evidence from Indonesia	Adama Bah	Oktober 2013	Poverty, Vulnerability, Household consumption
Kertas Kerja 3	Education Transfer, Expenditures and Child Labour Supply in Indonesia: An Evaluation of Impacts and Flypaper Effects	Sudarno Sumarto, Indunil De Silva	Desember 2013	Cash transfers, child labour, education expenditure, flypaper effect
Kertas Kerja 4	Poverty-Growth-Inequality Triangle: The Case of Indonesia	Sudarno Sumarto, Indunil De Silva	Desember 2013	Growth, poverty, inequality, pro-poor, decomposition
Kertas Kerja 5	English version: Social Assistance for the Elderly in Indonesia: An Empirical Assessment of the <i>Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar</i> Programme* Bahasa Indonesia version: Asistensi Sosial untuk Usia Lanjut di Indonesia: Kajian Empiris Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar*	Sri Moertiningsih Adioetomo, Fiona Howell, Andrea McPherson, Jan Priebe	Maret 2013	ASLUT Programme, Elderly, Social Pensions, Lanjut Usia, Social Assistance, Social Security, Indonesia
			<i>*This Working Paper has been republished in 2014</i>	
Kertas Kerja 6	An Evaluation of the Use of the Unified Database for Social Protection Programmes by Local Governments in Indonesia	Adama Bah, Fransiska E. Mardianingsih, Laura Wijaya	Maret 2014	Unified Database, UDB, Basis Data Terpadu, BDT, Local Governments Institution
Kertas Kerja 7	Old-Age Poverty in Indonesia: Empirical Evidence and Policy Options - A Role for Social Pensions	Jan Priebe, Fiona Howell	Maret 2014	Social Pensions, Old-Age, Poverty, Elderly, ASLUT Programme, Indonesia
Kertas Kerja 8	The Life of People with Disabilities: An Introduction to the Survey on the Need for Social Assistance Programmes for People with Disabilities	Jan Priebe, Fiona Howell	Mei 2014	Disability, survey, Indonesia

	Judul	Penulis	Tanggal Terbit	Kata Kunci
Kertas Kerja 9	Being Healthy, Wealthy, and Wise: Dynamics of Indonesian Subnational Growth and Poverty	Sudarno Sumarto, Indunil De Silva	Juli 2014	Neoclassical growth, poverty, human capital, health, education, dynamic panel
Kertas Kerja 10	Studi Kelompok Masyarakat PNPM Lampiran Studi Kelompok Masyarakat PNPM	Leni Dharmawan, Indriana Nugraheni, Ratih Dewayanti, Siti Ruhanawati, Nelti Anggraini	Juli 2014	PNPM Mandiri, penularan prinsip PNPM
Kertas Kerja 11a	An introduction to the Indonesia Family Life Survey IFLS east 2012: Sampling Questionnaires Maps and Socioeconomic Background Characteristics	Elan Satriawan, Jan Priebe, Fiona Howell, Rizal Adi Prima	Juni 2014	IFLS, survey, panel, Indonesia
Kertas Kerja 11b	Determinants of Access to Social Assistance Programmes in Indonesia Empirical Evidence from the Indonesian Family Life Survey East 2012	Jan Priebe, Fiona Howell, Paulina Pankowska	Juni 2014	Social assistance, Indonesia, poverty, targeting, welfare, IFLS East
Kertas Kerja 11c	Availability and Quality of Public Health Facilities in Eastern Indonesia: Results from the Indonesia Family Life Survey East 2012	Jan Priebe, Fiona Howell, Maria Carmela Lo Bue	Juni 2014	IFLS East, survey, panel, Indonesia, Health, Public Health Facilities
Kertas Kerja 11d	Examining the Role of Modernisation and Healthcare Demand in Shaping Optimal Breastfeeding Practices: Evidence on Exclusive Breastfeeding from Eastern Indonesia	Jan Priebe, Fiona Howell, Maria Carmela Lo Bue	Juni 2014	Exclusive breastfeeding, modernisation, health-care supply, health-care demand, Indonesia, IFLS East
Kertas Kerja 12	Penyusunan Prototipe Indeks Pemberdayaan Masyarakat untuk PNPM Inti (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)	Wahyono Kuntohadi, Bagoes Joetarto, Silvira Ayu Rosalia, Syarifudin Prawiro Nagoro	Juli 2014	PNPM Inti, pemberdayaan masyarakat, analisis faktor, dashboard
Kertas Kerja 13	A Guide to Disability Rights Laws in Indonesia	Jan Priebe, Fiona Howell	Juli 2014	Disability, rights, law, constitution, Indonesia
Kertas Kerja 14	Social Assistance for the Elderly: The Role of the <i>Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar</i> Programme in Fighting Old Age Poverty	Sri Moertiningsih Adioetomo, Fiona Howell, Andrea Mcpherson, Jan Priebe	Agustus 2014	ASLUT Programme, Social Assistance, Elderly, Poverty, Indonesia

	Judul	Penulis	Tanggal Terbit	Kata Kunci
Kertas Kerja 15	Productivity Measures for Health and Education Sectors in Indonesia	Menno Pradhan, Robert Sparrow	September 2014	Health, Education, Productivity Measures, Spending, Expenditure, Indonesia
Kertas Kerja 16	Demand for Mobile Money and Branchless Banking among Micro and Small Enterprises in Indonesia	Guy Stuart, Michael Joyce, Jeffrey Bahar	September 2014	Micro and small enterprises, MSEs, Mobile Money, Branchless Banking, Financial Services, Indonesia
Kertas Kerja 17	Poverty and the Labour Market in Indonesia: Employment Trends Across the Wealth Distribution	Jan Priebe, Fiona Howell, Virgi Agita Sari	Oktober 2014	Labour, Employment, Working Poor, Poverty, Wealth Distribution, Indonesia
Kertas Kerja 18	PNPM Rural Income Inequality and Growth Impact Simulation	Jon R. Jellema	Oktober 2014	PNPM Rural, Income, Income Inequality, Infrastructure
Kertas Kerja 19a	Youth Employment in Indonesia: International and National Good Practices for Policy and Programme Improvement	Léa Moubayed, R. Muhamad Purnagunawan	Desember 2014	Youth Employment, Education, Vocational, Labour, Training
Kertas Kerja 19b	Youth Employment in Indonesia: Compendium of Best Practices and Recommendations for Indonesia	Léa Moubayed, R. Muhamad Purnagunawan	Desember 2014	Youth Employment, Education, Vocational, Labour, Training, Good Practices
Kertas Kerja 20	Finding the Poor vs. Measuring Their Poverty: Exploring the Drivers of Targeting Effectiveness in Indonesia	Adama Bah, Samuel Bazzi, Sudarno Sumarto, and Julia Tobias	November 2014	Targeting, Proxy-Means Testing, Social Protection, Poverty

	Judul	Penulis	Tanggal Terbit	Kata Kunci
Kertas Kerja 21	Beyond the Headcount: Examining the Dynamic and Patterns of Multidimensional Poverty in Indonesia	Sudarno Sumarto, Indunil De Silva	Desember 2014	Empirical Studies, Income Poverty in Indonesia, Examined Multidimensional Household, Welfare, Consumption, Poverty, Multidimensional Poverty, Poverty Reduction, Measurement, Multiple Deprivation, Human Development
Kertas Kerja 22	Program Keluarga Harapan Payments through Alternative Channels: Strategy and Key Requirements	Michael Joyce, Brian Le Sar, Johann Bezuidenhout, Brendan Ahern, David Porteous	Desember 2014	PKH, PKH Payments Branchless Banking, Conditional Cash Transfer, Financial Instrument, Pre-paid Cards, Mobile Money, Disbursement
Kertas Kerja 23	Supply of Non-formal Training in Indonesia	Gorm Skjaerlund and Theo van der Loop	Februari 2015	Skills, training, training system, BLK, employers, human resources, labour market
Kertas Kerja 24	The Power of Transparency: Information, Identification Cards and Food Subsidy Programs in Indonesia	Abhijit Banerjee, Rema Hanna, Jordan Kyle, Benjamin A. Olken, Sudarno Sumarto	Februari 2015	Information, experiment, impact, development, aid, food, subsidy, social assistance, eligibility
Kertas Kerja 25	Sistem dan Standar Remunerasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	Epi Sediadmoko dan Yoseph Lucky	Maret 2015	PNPM, community empowerment, facilitators, remuneration, social assistance
Kertas Kerja 26	Qualitative Survey of Current and Alternative G2P Payment Channels in Papua and Papua Barat	Michael Joyce, Shelley Spencer, Jordan Weinstock and Grace Retnowati	April 2015	PKH, PKH payments, G2P, Government-to-Person, Papua, Papua Barat, BSM, payments, distribution

	Judul	Penulis	Tanggal Terbit	Kata Kunci
Kertas Kerja 27	Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Alat Pendorong Pengembangan UMKM di Indonesia	Meby Damayanti dan Latif Adam	April 2015	KUR, UMKM; Kredit Usaha Rakyat; Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Inklusi Keuangan
Kertas Kerja 28	Pembelajaran dari Uji Coba Desain Baru Raskin 2012: Temuan dari Studi Pemantauan TNP2K	Ari Perdana, Rizal Adi Prima, Elan Satriawan	April 2015	
Kertas Kerja 29	Pokok Pikiran Pembangunan Kawasan Perdesaan	Mohammad Maulana, Mulia Manik, Ahmad Marwan dan Epi Sepdiatmoko	Juni 2015	Perdesaan, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemberdayaan Masyarakat, UU Desa.

Kertas kerja ini menganalisis profil debitur KUR, terutama yang berkaitan dengan lokasi debitur, lokasi usaha, bidang usaha, sektor ekonomi, plafon kredit dan baki debit, tanggal mulai dan jatuh tempo pinjaman, tingkat suku bunga serta status kelancaran pengembalian pinjaman. Data yang digunakan untuk analisis merupakan data mikro yang berasal dari Sistem Informasi Debitur (SID) yang dimiliki Bank Indonesia. Hasil analisis menunjukkan SID belum sepenuhnya bisa diandalkan untuk memotret secara sempurna profil debitur KUR. Dibandingkan dengan data KUR dari Komite Kebijakan KUR, hasil analisis menunjukkan, untuk beberapa kasus SID cenderung *under reported* dan untuk beberapa kasus lainnya cenderung *over reported*. Selain itu, dengan menjadikan aturan KUR sebagai kerangka acuan, beberapa poin dari SID juga cenderung berbeda dari aturan yang ditetapkan. Agar SID bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai basis data untuk menganalisis secara lebih valid mengenai profil debitur KUR dan dampak dari kebijakan KUR terhadap pemberdayaan UKM, penciptaan kesempatan kerja, dan pengurangan kemiskinan, maka tata kelola SID perlu mendapat perbaikan. Kertas kerja ini merekomendasikan perbaikan tata kelola SID, khususnya di tiga bidang: proses pengumpulan data, manajemen pengelolaan data, dan integrasi SID dengan data KUR yang dimiliki Jamkrindo, Askrindo, dan Komite Kebijakan KUR.

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K)

Jl. Kebon Sirih No. 35, Jakarta Pusat 10110

Tel: +62 (0) 21 391 2812

Fax: +62 (0) 21 391 2511

E-mail: info@tnp2k.go.id

Web: www.tnp2k.go.id



Dicetak pada kertas daur ulang

